

PUSSENARMED ADAKAN SOSIALISASI KPO DAN PPO

Written by Penerangan

Thursday, 09 November 2017 09:43 - Last Updated Thursday, 09 November 2017 09:47



Cimahi - BKN mencoba melakukan terobosan terobosan berani dengan mengaplikasikan suatu aplikasi terbaru dalam setiap program-programnya dan termasuk yang satu ini yaitu mengenai Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO).Demikian penyampaian ASN.Riki Pramana, S Sos. Di aula Mapussenarmed, Jumat (11/8) dan ruang rapat Ahmad Yani Pusdikarmed, Sabtu(12/8)

PUSSENARMED ADAKAN SOSIALISASI KPO DAN PPO

Written by Penerangan

Thursday, 09 November 2017 09:43 - Last Updated Thursday, 09 November 2017 09:47



Program Kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis merupakan bentuk komitmen BKN dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian ASN yang terintegrasi dan memangkas alur layanan kepegawaian. Berlakunya KPO dan PPO akan mempermudah setiap ASN dalam mengajukan usulan kenaikan pangkat (UKP) reguler dan pensiun, tanpa perlu mengurus beragam persyaratan dokumen (*less paper*), sehingga dari awal proses pengusulan hingga penetapan dapat berjalan dengan singkat.

Jika sebelumnya seorang ASN yang akan pensiun haruslah menempuh jalan berbelit seperti

PUSSENARMED ADAKAN SOSIALISASI KPO DAN PPO

Written by Penerangan

Thursday, 09 November 2017 09:43 - Last Updated Thursday, 09 November 2017 09:47

dalam [dokumen berikut](#) , akan tetapi saat ini ASN yang akan memasuki masa pensiun cukuplah mengirimkan usulan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan menunggah surat pengantar, Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dan pas foto saja seperti dalam bagan di bawah ini. Khusus mengenai fasilitas akses SAPK sendiri disediakan untuk seluruh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ataupun Biro Kepegawaian di Instansi Pusat. Bagi instansi yang sudah teregister di BKN akan diberikan kode akses yaitu user-id dan password, sehingga dapat mengakses database kepegawaian yang ada di BKN.

Sistem kenaikan Pangkat Otomatis, jika sebelumnya haruslah dengan data berjibun dan cara yang rumit - saat ini BKN mnyederhanakan semuanya hanya dengan mengusulkan kenaikan pangkat melalui SAPK disertai dengan unggahan dokumen surat pengantar dan SKP maka usulan kenaikan pangkat sudah mulai bisa diproses. Kedua terobosan terbaru ini telah resmi diresmikan BKN pada tanggal 22 November 2016 di Kantor Pusat BKN Jakarta dan akan dihadiri oleh Menteri PAN-RB, Asman Abnur.

KPO dan PPO ini adalah merupakan rencana program yang akan diterapkan secara nasional, namun. Saat ini sistem ini barulah diterapkan di 5 daerah dan 2 instansi pusat sebagai *pilot project*

yaitu: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, BPPT dan Menpan RB.

Bersamaan dengan peresmian, sekaligus juga digelar *launching* Layanan Kepegawaian Terpadu yang akan digunakan sebagai sarana penunjang *pilot project*

KPO dan PPO. Dengan Layanan Kepegawaian Terpadu, pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun dapat berjalan transparan tanpa harus melewati proses yang kompleks, sekaligus sebagai upaya untuk memberantas tindak pungutan liar (pungli) yang selama ini dikenal melekat pada penyelenggaraan layanan publik. Sebagai tambahan informasi, layanan kepegawaian terpadu BKN di daerah sudah terlaksana di 12 (dua belas) dari 14 (empat belas) Kantor Regional (Kanreg) BKN di seluruh Indonesia.

Demikian penyampaian ASN Riki yang merupakan pembicara dari Pussenarmed dihadapan seluruh peserta sosialisasi KPO dan PPO yang dihadiri oleh peserta ASN Pussenarmed, Puskarmed dan Staf Pers Puskarpom yang dilaksanakan selama dua hari. (Penpussenarmed)